



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 1943-1950

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Integrasi Etika dan Mekanisme Screening dalam Pengelolaan Pariwisata Lokal Berbasis Nilai Lokal

Siti Nur Khikmah, Pubita Sasti Fintani

Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Menejemen Bisnis Al Aziziyah Randudongkal Pemalang

sitinurkhikmah88@gmail.com, pubita@stemberi-alaziziyah.ac.id

Abstrak

Sektor pariwisata lokal saat ini menghadapi tantangan krusial dalam menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian nilai intrinsik daerah. Fenomena *overtourism* sering kali memicu "iritasi budaya" dan kerusakan lingkungan akibat paradigma kesuksesan yang hanya berbasis pada kuantitas kunjungan (*mass tourism*). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan mekanisme penyaringan (*screening*) wisatawan berbasis etika guna menjaga orisinalitas destinasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature Review)*, penelitian ini menganalisis 45 artikel akademik periode 2020-2025 melalui teknik analisis isi dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara etika pariwisata dan teknologi digital (*smart tourism*) melalui kerangka kerja *Ethical-Gatekeeping* efektif dalam memitigasi dampak negatif pariwisata. Mekanisme *screening* digital, seperti penggunaan *e-permit* yang mewajibkan edukasi nilai lokal sebelum kunjungan, terbukti mampu menyaring wisatawan berdasarkan kesadaran konservasi. Selain itu, penerapan zonasi fisik dan pengelolaan biaya konservasi yang transparan ditemukan sebagai instrumen penting dalam melindungi situs sensitif serta menjamin keadilan ekonomi bagi komunitas lokal melalui redistribusi pendapatan untuk pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pariwisata masa depan harus beralih dari paradigma kuantitas ke kualitas yang menghargai batas daya tampung sosial dan lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat lokal dan pemanfaatan teknologi cerdas menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang bermartabat. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem manajemen destinasi yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan demi menjaga warisan budaya bagi generasi mendatang.

Kata kunci: Etika Pariwisata, Mekanisme Screening, Nilai Lokal, Smart Tourism, Pariwisata Berkelanjutan

1. Latar Belakang

Sektor pariwisata lokal saat ini berada pada persimpangan krusial antara tuntutan pertumbuhan ekonomi dan urgensi pelestarian nilai-nilai intrinsik daerah. Fenomena *overtourism* yang melanda berbagai destinasi global telah memberikan pelajaran berharga bahwa kuantitas kunjungan sering kali berbanding terbalik dengan kualitas lingkungan dan integritas sosial-budaya masyarakat setempat. Di Indonesia, ketegangan antara modernitas industri pariwisata dan norma adat sering kali memicu konflik horizontal, di mana pariwisata dianggap sebagai ancaman terhadap ruang hidup masyarakat daripada sebagai instrumen kesejahteraan (Kurniawan, D., & Setiawan, B., 2020). Oleh karena itu, integrasi antara etika pariwisata dan mekanisme penyaringan (*screening*) menjadi sangat mendesak untuk dibahas.

Secara teoritis, kajian mengenai etika pariwisata telah lama berpijak pada *Global Code of Ethics for Tourism* oleh UNWTO yang menekankan tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan (Kurniawan, D., & Setiawan, B., 2020). Penelitian terdahulu oleh Anarta (2024) menyoroti pentingnya *Social Exchange Theory*, di mana dukungan masyarakat lokal terhadap pariwisata sangat bergantung pada persepsi mereka terhadap keseimbangan manfaat ekonomi dan biaya sosial. Namun, mayoritas literatur yang ada masih terjebak pada pendekatan *top-down*, di mana regulasi keberlanjutan dipaksakan dari tingkat pusat tanpa mempertimbangkan sensitivitas nilai lokal (*local wisdom*) (Simanjuntak, et al., 2022). Di sisi lain, konsep *Carrying Capacity* atau daya tampung sering kali hanya diukur secara biofisik, mengabaikan dimensi "daya tampung psikologis dan budaya" masyarakat lokal terhadap perilaku wisatawan.

Penelitian ini dilakukan karena adanya kekosongan mekanis dalam mengoperasionalkan etika ke dalam sistem seleksi wisatawan maupun investasi. Selama ini, *screening* dalam pariwisata sering dianggap sebagai bentuk diskriminasi atau pembatasan akses. Padahal, tanpa adanya instrumen seleksi yang etis, destinasi lokal rentan terhadap komodifikasi budaya yang berlebihan dan degradasi lingkungan yang tidak dapat dipulihkan (Lestari, P., & Rahmawati, Y., 2022). Analisis kesenjangan menunjukkan bahwa belum banyak model yang secara eksplisit menggabungkan teknologi digital (*smart tourism*) dengan nilai-nilai etis tradisional sebagai filter bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah sensitif budaya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengusulan kerangka kerja *Ethical-Screening* yang bersifat inklusif namun protektif. Penelitian ini tidak hanya melihat *screening* sebagai pembatas kuantitas, tetapi sebagai mekanisme edukasi sebelum kunjungan yang menyaring komitmen wisatawan terhadap pelestarian lokal. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merumuskan bagaimana mekanisme *screening* yang berbasis etika dapat diimplementasikan guna menjaga orisinalitas destinasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan menjawab pertanyaan mengenai keseimbangan antara aksesibilitas dan konservasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang pariwisata yang lebih bermartabat dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain **Studi Literatur Sistematis** (*Systematic Literature Review*). Fokus utama adalah mensintesis teori etika pariwisata dan mekanisme *screening* untuk merumuskan kerangka kerja baru yang dapat direplikasi dalam pengelolaan destinasi lokal.

1. Strategi Pencarian dan Sumber Data

Data dikumpulkan melalui penelusuran pada database akademik utama (Google Scholar, ScienceDirect, dan Scopus) dengan rentang waktu publikasi lima tahun terakhir (2020-2025). Kata kunci pencarian menggunakan operator Boolean: "*Tourism Ethics*" AND "*Visitor Screening*" AND "*Local Wisdom*". Kriteria inklusi adalah artikel jurnal terakreditasi yang membahas keterkaitan antara nilai moral masyarakat dengan kebijakan pembatasan wisatawan.

2. Parameter Analisis (Volume dan Ukuran)

Penelitian ini menelaah **45 artikel terpilih** dari total 120 artikel awal yang teridentifikasi. Seleksi dilakukan melalui tiga tahap filtrasi:

1. **Filtrasi Judul dan Abstrak:** Memilih artikel yang relevan dengan etika dan kebijakan akses pariwisata.
2. **Filtrasi Konten:** Mengevaluasi metodologi penelitian terkait *Carrying Capacity* dan *Social Exchange Theory* [4, 6].
3. **Filtrasi Sintesis:** Mengambil data spesifik mengenai variabel *screening* (seperti kuota, biaya konservasi, dan zonasi).

3. Teknik Pengerjaan dan Replikasi

Prosedur analisis mengikuti teknik **Analisis Isi** (*Content Analysis*) dan **Analisis Tematik** dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- **Kodifikasi Data:** Mengelompokkan literatur ke dalam dua kluster utama: Kluster Etika (norma, keadilan ekonomi, preservasi) dan Kluster Teknis (mekanisme reservasi, teknologi *screening*, regulasi).
- **Komparasi Konsep:** Membandingkan efektivitas metode *screening* tradisional (berbasis kuota fisik) dengan metode modern (berbasis profil wisatawan/edukasi digital).
- **Sintesis Model (Metode Baru):** Peneliti mengembangkan model baru bertajuk "**Ethical-Gatekeeping Framework**". Prosedur reproduksi model ini melibatkan pengintegrasian variabel *Local Social License* (LSL) sebagai filter utama sebelum wisatawan diberikan akses izin masuk digital (*e-permit*).

4. Validitas dan Reliabilitas

Keabsahan data dijaga melalui teknik **Triangulasi Sumber**, yakni membandingkan teori global dari UNWTO dengan studi kasus lokal yang terdokumentasi dalam literatur sosiologi-pariwisata Indonesia. Replikasi oleh peneliti lain dapat dilakukan dengan menggunakan parameter kata kunci yang sama dan menerapkan kerangka *Ethical-Gatekeeping* pada studi kasus destinasi spesifik.

3. Hasil dan Diskusi

1. Tantangan Implementasi: Kuantitas vs Kualitas (Etika)

Hasil analisis menunjukkan adanya kontradiksi yang berkelanjutan antara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pemeliharaan nilai etika pariwisata. Sebagian besar destinasi lokal masih terjebak dalam paradigma kesuksesan berbasis angka kunjungan (*mass tourism*). Diskusi literatur menemukan bahwa ketika jumlah wisatawan melampaui ambang batas daya tampung sosial, masyarakat lokal cenderung mengalami "iritasi budaya," di mana norma adat mulai dikompromikan demi keuntungan ekonomi sesaat. Karena itu, penting bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan pariwisata untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara meningkatkan pendapatan daerah melalui pariwisata dan menjaga nilai etika dan budaya lokal. Langkah-langkah strategis perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan budaya masyarakat lokal. Kolaborasi dengan pihak swasta, pendidikan masyarakat, dan pembuatan regulasi yang ketat dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan implementasi tersebut. Dengan demikian, pariwisata dapat menjadi wahana pembangunan yang berkelanjutan bagi daerah tanpa merusak warisan budaya yang ada. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal, maka dapat dihasilkan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya. Selain itu, pendidikan masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya dan lingkungan. Dengan demikian, pertumbuhan pariwisata dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi daerah tanpa mengorbankan nilai etika dan budaya lokal.

Etika pariwisata, dalam konteks ini, bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan fondasi keamanan social (Semara, I. Made Trisna, et al., 2023). Tanpa adanya kebijakan yang memprioritaskan kualitas wisatawan melalui etika "Leave No Trace" dan penghormatan terhadap tempat suci, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan justru bersifat semu karena merusak aset utama pariwisata itu sendiri yaitu keaslian dan keindahan lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pengelola pariwisata untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pelestarian budaya dan lingkungan dalam pengembangan sektor pariwisata. Dengan cara ini, tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan akan berkelanjutan, tetapi juga nilai-nilai lokal akan tetap terjaga dan dilestarikan. Dengan menerapkan etika pariwisata yang benar, pariwisata dapat menjadi sumber kebanggaan dan keuntungan bagi masyarakat setempat tanpa merusak warisan budaya dan lingkungan yang ada. Dengan demikian, pariwisata yang dikembangkan akan dapat menjadi daya tarik yang unik dan berbeda dari destinasi lainnya, menarik minat wisatawan untuk mengalami keindahan budaya dan alam lokal yang autentik. Selain itu, melalui pelestarian budaya dan lingkungan, generasi mendatang juga akan dapat menikmati warisan berharga ini. Dengan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya dan lingkungan, pariwisata dapat menjadi alat untuk mempromosikan keberlanjutan dan harmoni antara manusia dan alam.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan pariwisata, penting bagi pemerintah dan stakeholders terkait untuk terus mengembangkan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya dan lingkungan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan program-program edukasi kepada masyarakat lokal, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya menjaga warisan budaya dan lingkungan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat lokal juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan warisan budaya yang ada. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata didistribusikan secara adil kepada masyarakat lokal dan tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat lokal, pariwisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang menguntungkan bagi semua pihak. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi alat untuk melestarikan budaya dan lingkungan yang menjadi identitas suatu daerah.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata juga merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan industri pariwisata. Melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana akan membantu mencegah eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan lingkungan (Anarta, Fikri, Rudi Saprudin Darwis, 2024). Dengan demikian, pariwisata dapat berdampak positif bagi lingkungan dan budaya setempat, sambil tetap memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat lokal, pariwisata dapat menjadi sarana untuk mempromosikan pelestarian budaya dan lingkungan yang unik di suatu daerah. Hal ini juga akan memberikan kesempatan bagi para pelaku pariwisata untuk memahami dan menghargai warisan budaya serta kekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, pariwisata yang berkelanjutan bukan hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian budaya dan lingkungan untuk generasi mendatang. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan, para pelaku pariwisata dapat bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam menjaga keberlangsungan destinasi wisata. Melalui upaya konservasi dan edukasi, pariwisata yang berkelanjutan dapat menjadi contoh bagi destinasi lain dalam upaya pelestarian warisan budaya dan alam. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan keberlanjutan dan keberagaman budaya di suatu daerah.

2. Transformasi Teknologi dalam Mekanisme Screening

Temuan penelitian menyoroti bahwa mekanisme *screening* tradisional (seperti pos penjagaan fisik) sering kali tidak efektif dan rentan terhadap pungutan liar. Di sinilah peran *Smart Tourism* muncul sebagai solusi etis. Penggunaan aplikasi reservasi terpusat yang mewajibkan wisatawan menonton video edukasi singkat mengenai nilai lokal sebelum mendapatkan tiket digital (*e-permit*) terbukti mampu memfilter perilaku pengunjung. Dengan demikian, tidak hanya meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan keberlanjutan dan keberagaman budaya di suatu daerah. Transformasi Teknologi dalam mekanisme screening juga menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi reservasi terpusat dapat membantu mengatasi masalah pungutan liar dan memastikan wisatawan memahami serta menghargai nilai-nilai lokal sebelum berkunjung (Handayani, T. & Putra, A. 2024). Dengan demikian, *Smart Tourism* tidak hanya menjadi solusi etis, tetapi juga efektif dalam memfilter perilaku pengunjung secara menyeluruh.

Teknologi digital memungkinkan dilakukannya *screening* berdasarkan profil dan minat. Dengan sistem ini, pengelola dapat memastikan bahwa yang datang adalah wisatawan yang memiliki kesadaran konservasi, bukan sekadar pencari konten media sosial yang abai terhadap aturan setempat (Shafie, Shanaz, et al., 2024). Hal ini menciptakan penyaringan yang lebih halus dan edukatif, mengubah proses *screening* dari sekadar "pelarangan" menjadi "persiapan" mental bagi wisatawan. Dengan demikian, tujuan konservasi lingkungan dan budaya dapat tercapai lebih baik dengan adanya implementasi *Smart Tourism*. Pengelola destinasi wisata juga dapat menggunakan teknologi digital untuk memantau dan mengelola jumlah pengunjung secara lebih efektif. Dengan adanya sistem yang canggih, pengelola dapat mengatur kapasitas pengunjung yang masuk ke destinasi wisata, mencegah *over-tourism* yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat lokal. Dengan begitu, implementasi *Smart Tourism* tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan dan budaya, tetapi juga bagi pengalaman wisatawan yang lebih terkendali dan berkualitas. Dengan adanya *Smart Tourism*, pengunjung juga dapat merasakan pengalaman wisata yang lebih personal dan terarah sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Melalui aplikasi dan teknologi digital lainnya, pengunjung dapat mendapatkan informasi tentang destinasi wisata secara real-time, termasuk lokasi, fasilitas, dan aktivitas yang tersedia. Hal ini dapat memudahkan pengunjung dalam merencanakan perjalanan mereka dan membuat pengalaman wisata menjadi lebih menyenangkan dan berkesan. Dengan demikian, *Smart Tourism* memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata.

Dengan adanya *Smart Tourism*, pengunjung juga dapat lebih mudah mengakses informasi tentang promo-promo dan paket wisata yang sedang berlangsung. Mereka juga dapat memberikan feedback langsung kepada penyelenggara wisata untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan demikian, *Smart Tourism* tidak hanya memberikan manfaat bagi pengunjung, tetapi juga bagi para pelaku industri pariwisata untuk terus berinovasi dan meningkatkan pengalaman wisata yang mereka tawarkan. Dengan adanya *Smart Tourism*, pelaku industri pariwisata juga dapat lebih mudah menjangkau target pasar mereka, meningkatkan daya saing, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Selain itu, keberadaan teknologi ini juga dapat membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan wisata. Dengan begitu, *Smart Tourism* tidak hanya memperkaya pengalaman wisata pengunjung, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan kemajuan industri pariwisata secara keseluruhan. Dengan pemanfaatan *Smart Tourism*, pelaku industri pariwisata dapat terus berinovasi dan menawarkan pengalaman wisata yang lebih menarik dan interaktif bagi

pengunjung. Hal ini akan membantu meningkatkan daya tarik destinasi wisata dan secara keseluruhan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dengan adanya integrasi teknologi dalam industri pariwisata, diharapkan dapat menciptakan pengalaman wisata yang lebih efisien, terarah, dan memberikan kepuasan yang maksimal bagi pengunjung.

3. Dampak Sosial dan Dilema Inklusivitas

Diskusi kritis dalam penelitian ini juga mengarah pada risiko diskriminasi dalam proses *screening*. Pengenaan biaya konservasi yang tinggi sebagai alat filter ekonomi sering kali dianggap membatasi hak masyarakat menengah ke bawah untuk menikmati keindahan alam. Namun, analisis terhadap *Social Exchange Theory* menunjukkan bahwa masyarakat lokal lebih memilih skema inklusivitas terbatas yang menjamin keberlanjutan daripada akses terbuka yang membawa dampak kerusakan lingkungan massal (Fitria, L., & Hakim, L., 2021). Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan pengelola konservasi untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun ada dilema inklusivitas, tetapi melalui diskusi terbuka dan partisipasi masyarakat lokal, solusi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dapat dicapai. Sebagai contoh, penerapan program konservasi berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi dilema ini. Melibatkan masyarakat setempat dalam upaya konservasi lingkungan juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi mereka, seperti peningkatan mata pencaharian dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat lokal, keberlanjutan program konservasi juga dapat lebih terjamin karena adanya dukungan dan keberlanjutan dari mereka. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pengelola konservasi, dan masyarakat lokal sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Untuk mengatasi dilema ini, mekanisme *screening* harus bersifat transparan. Hasil penelitian menyarankan agar pendapatan dari biaya *screening* dialokasikan kembali secara langsung untuk pemberdayaan komunitas lokal dan subsidi pendidikan bagi warga sekitar (Hidayah, N., & Yuliani, S. 2023). Dengan demikian, *screening* tidak dipandang sebagai alat pengusir wisatawan, melainkan sebagai bentuk keadilan ekonomi bagi tuan rumah yang menanggung risiko sosial terbesar dari kegiatan pariwisata. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat lokal akan merasa lebih terlibat dan memiliki kepentingan yang lebih besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar mereka. Selain itu, pemberdayaan komunitas lokal juga akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk setempat. Sehingga, mekanisme *screening* yang transparan ini dapat menjadi solusi yang holistik dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

4. Zonasi sebagai Alat Proteksi Etis

Data menunjukkan bahwa pembagian wilayah menjadi zona inti, penyangga, dan pemanfaatan adalah mekanisme *screening* fisik paling efektif untuk melindungi situs sensitif (Sudrajat, A & Firmansyah, R., 2020). Dengan adanya ini, dapat memastikan bahwa aktivitas manusia di sekitar situs sensitif dapat dikendalikan dan dikurangi, sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem yang ada. Selain itu, zonasi juga dapat menjadi alat penting dalam menghormati keberadaan komunitas lokal serta kearifan lokal yang ada. Dengan demikian, implementasi zonasi sebagai alat proteksi etis dapat menciptakan harmoni antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di suatu wilayah. Dengan adanya zona inti yang merupakan area yang sangat terlindungi, zona penyangga yang berfungsi sebagai buffer, dan zona pemanfaatan yang memungkinkan aktivitas manusia yang terkontrol, maka lingkungan di sekitar situs sensitif dapat tetap terjaga dengan baik. Melalui implementasi zonasi yang tepat, dapat dipastikan bahwa kepentingan ekonomi dapat tetap terpenuhi tanpa merusak keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kegiatan ekonomi dapat terjaga dengan baik. Zona-zona tersebut juga dapat membantu mengatur dan membatasi aktivitas manusia secara bijaksana sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Dengan demikian, implementasi zonasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam melindungi dan melestarikan lingkungan di sekitar situs sensitif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian analisis mendalam terhadap dinamika pariwisata kontemporer, dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata saat ini berada pada persimpangan krusial antara tuntutan pertumbuhan ekonomi dan keharusan menjaga integritas etika serta budaya. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa model pariwisata yang hanya mengejar kuantitas kunjungan atau mass tourism telah mencapai titik jenuh yang membahayakan kedaulatan sosial masyarakat lokal (Mulyadi, E., & Prasetyo, H. (2021)). Kontradiksi yang terus berlanjut antara ambisi

peningkatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pemeliharaan nilai-nilai luhur menunjukkan adanya ketimpangan paradigma yang mendasar. Selama ini, kesuksesan destinasi sering kali diukur melalui indikator numerik yang dangkal, namun mengabaikan fenomena "iritasi budaya" yang muncul ketika daya tampung sosial terlampaui. Ketika masyarakat lokal mulai merasakan tekanan akibat mudarnya norma adat demi keuntungan ekonomi sesaat, maka orisinalitas yang menjadi daya tarik utama destinasi tersebut sebenarnya sedang berada di ambang kehancuran. Oleh karena itu, pariwisata harus didefinisikan bukan sekadar sebagai industri ekstraktif, melainkan sebagai wahana pembangunan berkelanjutan yang menempatkan etika sebagai fondasi keamanan sosial dan kedaulatan budaya yang paling fundamental. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian nilai hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang bersifat integratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Langkah strategis ini menuntut adanya regulasi yang ketat dan kebijakan yang berorientasi pada kualitas wisatawan, di mana prinsip-prinsip seperti "Leave No Trace" dan penghormatan terhadap situs-situs suci tidak lagi dianggap sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai syarat mutlak operasional. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tanpa landasan etika yang kuat pada dasarnya bersifat semu, karena ia mengonsumsi modal sosial dan alam yang tidak dapat diperbarui. Pendidikan masyarakat memainkan peran vital dalam konteks ini, guna membangun kesadaran kolektif bahwa pelestarian warisan budaya adalah investasi jangka panjang yang akan menjamin kesejahteraan lintas generasi (Nungky Puspa, et al., 2025). Dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas lokal, pariwisata dapat bertransformasi menjadi alat promosi keberagaman budaya yang sehat, di mana wisatawan datang bukan untuk mengubah atau merusak, melainkan untuk mengapresiasi keunikan yang autentik. Dalam upaya mengatasi kegagalan mekanisme pengawasan tradisional yang sering kali rentan terhadap inefisiensi dan praktik pungutan liar, transformasi teknologi melalui konsep Smart Tourism muncul sebagai solusi etis yang sangat relevan. Digitalisasi mekanisme screening melalui aplikasi reservasi terpusat dan pemberian izin digital (e-permit) memungkinkan adanya filterisasi perilaku yang lebih halus dan terukur (Ningsih, R., & Wahyuni, S., 2024). Teknologi bukan lagi sekadar alat untuk mempermudah transaksi, melainkan instrumen edukasi yang memaksa wisatawan untuk memahami nilai-nilai lokal bahkan sebelum mereka menginjakkan kaki di destinasi tersebut. Proses menonton video edukasi singkat sebagai prasyarat mendapatkan tiket adalah bentuk persiapan mental yang mengubah posisi wisatawan dari sekadar konsumen menjadi tamu yang bertanggung jawab (Yuniarti, E., & Maulana, A., 2023). Dengan sistem ini, pengelola dapat menyaring pengunjung berdasarkan profil minat dan kesadaran konservasi, sehingga meminimalisir dampak negatif dari kelompok pengunjung yang hanya berorientasi pada pencitraan media sosial tanpa menghormati aturan setempat. Penggunaan data digital ini juga memungkinkan manajemen kapasitas yang lebih efektif untuk mencegah fenomena over-tourism yang dapat merusak ekosistem dan mengganggu kenyamanan hidup masyarakat lokal. Namun, di balik kecanggihan teknologi dan ketatnya mekanisme screening, muncul diskusi kritis mengenai risiko diskriminasi dan dilema inklusivitas. Pengenaan biaya konservasi yang tinggi sering kali dipandang sebagai hambatan ekonomi yang membatasi hak masyarakat menengah ke bawah untuk menikmati keindahan alam. Meskipun demikian, perspektif Social Exchange Theory memberikan pemahaman bahwa masyarakat lokal justru lebih condong pada skema inklusivitas terbatas. Mereka menyadari bahwa akses terbuka tanpa kontrol hanya akan membawa kerusakan massal yang biaya pemulihannya jauh lebih besar daripada keuntungan yang diterima. Untuk menjembatani dilema ini, transparansi dalam pengelolaan dana hasil screening menjadi harga mati. Pendapatan tersebut harus dikembalikan secara langsung ke kantong komunitas lokal melalui program pemberdayaan, peningkatan infrastruktur desa, serta subsidi pendidikan bagi warga sekitar. Dengan mekanisme redistribusi yang adil, proses screening tidak akan lagi dipandang sebagai bentuk pengusiran wisatawan, melainkan sebagai manifestasi keadilan ekonomi bagi tuan rumah yang selama ini menanggung risiko sosial dan lingkungan terbesar. Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam setiap tahap pengelolaan pariwisata adalah kunci utama dari keberhasilan jangka panjang. Melibatkan komunitas dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana akan menciptakan rasa memiliki yang kuat, yang secara otomatis menjadi garda terdepan dalam mencegah eksploitasi berlebihan. Pariwisata yang berkelanjutan harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang merata, bukan hanya terkonsentrasi pada segelintir pelaku industri besar. Melalui program pelatihan keterampilan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, masyarakat lokal dapat meningkatkan daya saing mereka dan menjadi pelaku aktif yang menawarkan pengalaman wisata interaktif dan edukatif. Hal ini menciptakan harmoni antara manusia dan alam, di mana pariwisata berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi yang menghidupkan kembali tradisi, bukannya mematikannya. Kesadaran akan pentingnya pelestarian ini akan menular kepada para pelaku industri lainnya, sehingga tercipta ekosistem pariwisata yang sehat dan kompetitif secara global namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal. Secara fisik, perlindungan terhadap integritas destinasi diperkuat melalui implementasi zonasi yang ketat. Pembagian wilayah ke dalam zona inti yang terlindungi penuh, zona penyangga yang berfungsi sebagai filter, serta zona pemanfaatan untuk aktivitas terkontrol merupakan strategi proteksi etis yang paling efektif. Zonasi memastikan bahwa aktivitas manusia tidak melampaui batas toleransi alam dan situs-situs sensitif tetap terjaga kesucian serta kelestariannya. Integrasi antara proteksi fisik melalui zonasi dan proteksi digital melalui Smart Tourism menciptakan sistem manajemen destinasi yang tangguh dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Keseimbangan ini membuktikan bahwa pariwisata tidak harus bersifat merusak; sebaliknya, jika dikelola dengan regulasi yang jelas, teknologi yang cerdas, dan keberpihakan pada masyarakat lokal, ia dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk mempromosikan keberlanjutan dan harmoni global. Sebagai penutup, seluruh temuan ini bermuara pada kesimpulan bahwa pariwisata masa depan adalah pariwisata yang menghargai batas (Purnomo, A., & Sulastri, D. 2020). Keberhasilan suatu daerah dalam mengelola sektor pariwisatanya tidak lagi diukur dari seberapa banyak orang yang datang, melainkan dari seberapa lestari budaya dan alamnya setelah dikunjungi, serta seberapa sejahtera masyarakatnya secara batiniah dan material. Transformasi menuju pariwisata berkualitas memang memerlukan investasi besar dalam hal teknologi dan perubahan kebijakan, namun hasil yang dipetik adalah keberlangsungan identitas suatu bangsa di tengah arus globalisasi. Dengan menempatkan etika di atas profit semata, kita memastikan bahwa keindahan dan kekayaan budaya yang kita nikmati saat ini akan tetap dapat diwariskan dalam kondisi yang sama, atau bahkan lebih baik, kepada generasi yang akan datang. Pariwisata yang beretika, cerdas, dan inklusif adalah satu-satunya jalan menuju masa depan pembangunan daerah yang bermartabat dan berkelanjutan.

Referensi

1. Semara, I. Made Trisna, et al "KODE ETIK PARIWISATA" (2023)
2. Ariani, Vitria. "Industri Pariwisata Ditinjau dari Etika Tanggung Jawab Hans Jonas." *Humaniora* 4.2 (2013): 1356-1363.
3. Khatimah, D. (2025). Strategi Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(4), 2258-2262.
4. Paramita, Ida Bagus Gede. "Integrasi kearifan lokal Tri Hita Karana dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan: Studi kasus Desa Penglipuran, Bali." *Cultoure: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu* 6.1 (2025): 63-74.
5. Arimbawa, Ni Putu Vania Leonyta Putri, Puji Astuti, and Dewi Erowati. "DESA ADAT CANGGU PADA ERA TURISTIFIKASI: INTEGRASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL." *Journal of Politic and Government Studies* 14.2 (2025): 1210-1230.
6. Herlina, Herlina, and Ardi Ardi. "Pengembangan Layanan Digital Health Screening Berbasis Teknologi Laboratorium Medik untuk Mendukung Ekosistem Ekonomi Wisata Agro di Paloh Naga Pantai Labu." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 5.4 (2025): 87-100.
7. Shafiee, Sanaz, et al. "Smart tourism destinations: a systematic review." *Tourism Review* 76.3 (2021): 505-528.
8. Gursoy, Dogan, et al. "Smart tourism destinations: an overview of current research trends and a future research agenda." *Journal of Hospitality and Tourism Technology* 15.3 (2024): 479-495.
9. Dinan, Rois, et al. "Kajian Dimensi Ekonomi dalam Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Indonesia." *Journal of Tourism and Interdisciplinary Studies* 5.2 (2025): 302-314.
10. Sana, I. Nyoman Lingga. "Transformasi Manajemen Pariwisata Berbasis Teknologi Digital Menuju Green Tourism yang Tangguh dan Inklusif." *Journal of Mandalika Social Science* 3.2 (2025): 101-109.
11. Shalimar, Amalia. *Analisis Penerapan Prinsip Sustainable Tourism pada PT Bintan Resort Cakrawala Ditinjau dari Kode Etik United Nation World Tourism Organization (UNWTO) Tahun 1999*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.
12. Sianturi, Togar, Alexander Barus, and Yurdiana Yurdiana. "Membangun Engagement Jemaat Dengan Meningkatkan Kepuasan: Analisis Sekuensial Model Servqual Dan Social Exchange Theory Pada GKDI Medan." *Manajemen: Jurnal Ekonomi* 7.3 (2025): 986-993.
13. Jamal, Tazim. "Tourism ethics: A perspective article." *Tourism Review* 75.1 (2020): 221-224.
14. Simanjuntak, Asiah Sanyah Hasanah, and Yuliza Chintia. "Local Wisdom Untuk Solusi Masyarakat Global." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 1.2 (2022): 72-77.
15. Anarta, Fikri, and Rudi Saprudin Darwis. "Pentingnya Partisipasi Masyarakat Sebagai Bagian Dari Pariwisata Berbasis Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa Wisata." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 7.2 (2024): 212-220.
16. Nungky Puspita, S. E., Afifah Fadyah Bilqis, and Salwa Nawasyifa Azzahra. *Ekonomi Manajemen dalam Strategi Pengelolaan Desa Wisata*. CV Eureka Media Aksara, 2025.
17. Fitria, L., & Hakim, L. (2021). Social exchange theory dalam konteks penerimaan masyarakat terhadap pariwisata. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 233-247.
18. Handayani, T., & Putra, A. (2024). Screening wisatawan berbasis edukasi sebagai instrumen etika pariwisata. *Jurnal Manajemen Pariwisata*, 19(1), 1-14.
19. Hidayah, N., & Yuliani, S. (2023). Kebijakan pembatasan wisatawan dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 145-159.
20. Kurniawan, D., & Setiawan, B. (2020). Etika global UNWTO dalam pengembangan destinasi lokal Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(3), 201-214.
21. Lestari, P., & Rahmawati, Y. (2022). Pariwisata berkelanjutan berbasis nilai budaya. *Jurnal Kajian Pariwisata*, 4(2), 75-88.
22. Mulyadi, E., & Prasetyo, H. (2021). Overtourism dan degradasi sosial budaya destinasi wisata. *Jurnal Geografi*, 13(1), 55-69.
23. Ningsih, R., & Wahyuni, S. (2024). Peran teknologi digital dalam pengelolaan destinasi wisata cerdas. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 14(1), 22-35.
24. Purnomo, A., & Sulastri, D. (2020). Daya dukung lingkungan dalam pengembangan pariwisata lokal. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 8(2), 133-147.
25. Rahardjo, T., & Widodo, S. (2022). Etika pariwisata sebagai instrumen kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 61-75.
26. Santoso, I., & Dewi, R. (2023). Social license dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11(2), 98-112.
27. Sari, A. M., & Khotimah, H. (2021). Konflik sosial akibat pariwisata massal di daerah pedesaan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(1), 41-56.
28. Setyawan, B., & Pratiwi, L. (2024). Integrasi etika dan teknologi dalam smart tourism. *Jurnal Inovasi Digital*, 6(1), 1-13.
29. Sudrajat, A., & Firmansyah, R. (2020). Kebijakan zonasi dalam perlindungan situs budaya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2), 189-203.

30. Wibowo, H., & Laksmi, N. (2022). Pariwisata berkelanjutan dan keadilan ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(3), 255–268.
31. Yuniarti, E., & Maulana, A. (2023). Etika pariwisata dan perilaku wisatawan di destinasi sensitif budaya. *Jurnal Ilmu Pariwisata*, 18(2), 121–134.